

MEDIA MASSA, NEGARA DAN DEMOKRASI: KEKUATAN POLITIK MEDIA MASSA DALAM MENDORONG PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Zudi Setiawan

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wahid Hasyim. Email: zudisetiawan@unwahas.ac.id

Abstract

Politics is closely related to the mass media, because one of the aims of the mass media is to form general opinions on various matters, especially politics. Mass media with a persuasive function that is capable of public opinion and is able to influence opinions on developing political issues. Within the country, the centralization of the political role of the mass media has stated. The state has often emphasized the importance of the press in the nation-building process. The strength of the mass media lies in the ability of the mass media to present political events that can influence public perceptions and political actors regarding political developments.

Keywords: *politics, mass media, country, democracy*

Abstrak

Politik sangat berhubungan erat dengan media massa, karena salah satu tujuan media massa yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal, terutama hal politik. Media massa dengan fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum dan mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Dalam negara, pemusatan peranan politik media massa telah diakui. Negara telah sering menekankan pentingnya pers dalam proses nation building. Kekuatan media massa terutama terletak pada kemampuan media massa dalam menampilkan peristiwa-peristiwa politik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik mengenai perkembangan politik.

Kata Kunci: *politik, media massa, negara, demokrasi*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru yang memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia sejak 1966 memiliki keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya. Hal ini kemudian menimbulkan dampak-dampak negatif

bagi bangsa Indonesia, misalnya dengan adanya berbagai macam penyelewengan yang dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat. Kebebasan pers (media massa) pada masa Orde Baru juga tidak pernah terwujud.

Pada masa Orde Baru pula praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin membudaya di kalangan penyelenggara negara dan aparat birokrasi. Penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berakibat pada terjadinya krisis multidimensi, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, ternyata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencapai Rp. 5.000,00 per dollar. Bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp. 16.000,00 per dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu, untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Ternyata usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat mengembalikan begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggung beban utang yang sangat besar. Keadaan seperti itu dapat menurunkan

kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Walaupun pada awal tahun 1998 pemerintah Indonesia membuat kebijakan uang ketat dan suku bunga bank tinggi, namun krisis moneter tetap tidak dapat teratasi. Akhirnya pada bulan April 1998 pemerintah membekukan tujuh buah bank bermasalah.¹

Kondisi seperti ini semakin diperparah oleh para spekulasi valuta asing baik dari dalam maupun dari luar negeri yang memanfaatkan keuntungan sesaat, sehingga kondisi ekonomi nasional semakin bertambah buruk. Oleh karena itu, krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang luar negerinya yang telah jatuh tempo. Bahkan, banyak perusahaan yang mengurangi atau menghentikan sama sekali kegiatannya. Akibatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat terbendung lagi. Angka pengangguran meningkat, sehingga daya beli dan kualitas hidup masyarakat pun semakin bertambah rendah. Dampaknya, kesenjangan ekonomi yang telah terjadi sebelumnya semakin melebar setelah berlangsungnya krisis ekonomi tersebut.²

Kondisi perekonomian semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997 persediaan Sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali sehingga biaya hidup semakin bertambah tinggi. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Irian Barat (Papua), Nusa Tenggara Timur dan termasuk di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sementara itu, untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia belum terealisasi, walaupun pada 15 Januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (*Letter of Intent* atau LoI) dengan IMF. Faktor

¹ | Wayan Badrika, *Sejarah untuk SMA Jilid III*, Erlangga, Jakarta, 2006, Hal. 162

² *Ibid.*, Hal. 163.

lain yang menyebabkan krisis ekonomi Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawiro pada Sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin Presiden Suharto di Bina Graha mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Para pedagang luar negeri tidak percaya lagi terhadap importir Indonesia yang dianggapnya tidak akan mampu membayar barang dagangan mereka. Hampir semua negara tidak mau menerima *Letter of Credit* dari Indonesia. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.³

Dari sinilah dapat dipahami bahwa dalam kurun waktu 1996 hingga 1998, pemerintahan Orde Baru mulai kehilangan salah satu fondasi utama kekuasaannya, yakni stabilitas ekonomi. Perekonomian Indonesia benar-benar mengalami keterpurukan. Hal tersebut berimbas pada persoalan represifnya kebijakan politik saat itu. Dalam gerakan protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dimotori oleh mahasiswa, telah terjadi penembakan terhadap 4 orang mahasiswa di Kampus Trisakti, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Terjadinya peristiwa penembakan terhadap mahasiswa ini membuat masyarakat tidak lagi bisa menerima tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pada skala yang lebih besar, gerakan demonstrasi mahasiswa kemudian mengarah pada tuntutan supaya Jenderal Suharto turun dari pusat kekuasaan.

Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadilah kerusuhan besar di Jakarta. Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta dan gedung-gedung DPRD di daerah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar Harmoko pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.20 WIB, di Gedung DPR yang dipenuhi ribuan

³ *Ibid.*, Hal. 163.

mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Suharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.

Pada akhirnya, kekuasaan pemerintahan Orde Baru harus berakhir yang ditandai dengan turunnya Suharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Suharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9.00 WIB. Suharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpangnya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR. Presiden Suharto kemudian digantikan oleh B.J Habibie. Setelah dilantik menjadi presiden RI ketiga, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet yang diberi nama "Kabinet Reformasi". Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Presiden B.J. Habibie juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.⁴

Menurut penulis, gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pascaruntuhnya rezim Orde Baru pada dasarnya mengandung dua dimensi dinamis di dalamnya. *Pertama*, terkandung upaya perubahan pada tatanan lama yang otoriter, korup, dan tidak berpihak kepada rakyat. *Kedua*, adanya upaya penciptaan suatu tatanan baru yang lebih demokratis, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

Perubahan terhadap tatanan lama (Orde Baru) adalah suatu keharusan, karena telah terbukti bahwa tatanan tersebut menghasilkan suatu rezim politik yang otoriter dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Institusionalisasi kekuasaan politik

⁴ Ibid.

pada masa Orde Baru telah menjadi semakin elitis, karena rekrutmen politik pada masa itu tidak mengindahkan aspirasi masyarakat luas. Pemilihan umum hanya berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Suara-suara dari luar lingkup kekuasaan yang terlalu kritis dihambat, bahkan dimusnahkan oleh penguasa Orde Baru. Sehingga, kebebasan pers (media massa) dapat dikatakan tidak pernah terwujud pada masa Orde Baru.

Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru telah menandai kemunculan era Reformasi yang juga sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik. Proses perubahan yang terjadi secara revolusioner pada tahun 1998, telah membawa Indonesia memasuki fase demokratisasi politik, yang selama rezim Orde Baru berkuasa tidak pernah diwujudkan.

Munculnya Orde Reformasi telah menjadi awal dimulainya upaya demokratisasi di Indonesia. Orde Reformasi ini diyakini akan membawa harapan baru dan menghasilkan perubahan yang lebih baik dibandingkan orde sebelumnya. Dalam proses perubahan, terutama yang terjadi setelah turunnya Suharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, Indonesia memasuki fase demokratisasi politik yang terjadi secara besar-besaran. Masa ini sering disebut sebagai masa transisi menuju demokrasi.

Politik Indonesia pada masa transisi pascaOrde Baru merupakan politik yang muncul karena euphoria. Semua orang dan kelompok masyarakat merasa lega karena telah terlepas dari sebuah beban berat yang bernama otoritarianisme di bawah rezim pemerintahan Suharto⁵. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pada perkembangan berikutnya adalah munculnya era keterbukaan dan kebebasan politik di Indonesia.

Pada masa transisi ini telah terjadi redefinisi hak-hak politik rakyat, peninjauan ulang dwi fungsi ABRI, pola baru kepemimpinan nasional, peran kelompok strategis baru di dalam lembaga negara, pengembalian peran dan fungsi partai, dan partisipasi aktif

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 316.

masyarakat di dalam proses kebijaksanaan dan pengawasan politik⁶. Dari sinilah kemudian kebebasan pers mulai menemukan titik terang untuk bisa diwujudkan di Indonesia. Media massa pun relatif mendapatkan ruang gerak yang lebih memadai untuk merepresentasikan situasi sosial politik yang terus berkembang. Beragam koran, majalah, hingga stasiun siaran televisi baru mulai bermunculan seiring dengan semakin terbukanya ruang kebebasan bagi industri media massa.

Demokratisasi struktur politik pada masa transisi ditandai oleh adanya penyeimbangan kekuatan dan kekuasaan atas lembaga negara, kelompok strategis, dan kekuatan sosial-politik. Demokratisasi politik terfokus pada penggunaan kompetisi, tawar-menawar (*bargaining*), dan persetujuan sebagai mekanisme hubungan kekuasaan. Proses itu berlangsung melalui dan oleh lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga kenegaraan, bukan oleh hubungan pribadi⁷.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Analitis yang dimaksud adalah metode yang menghimpun kenyataan yang dilukiskan secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain. Metode deskriptif analitis ini diperlukan untuk menggali data, fakta, serta teori-teori yang akan menjadikan suatu kepercayaan itu benar secara teoritik maupun empirik. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan kekuatan politik media massa dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru.

⁶ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 28.

⁷ *Ibid.*, hal. 27.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh rakyat⁸. Menurut Adam Przeworski, proses pendirian demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian dan menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian⁹.

Menurut Samuel P. Huntington, pada tingkatan paling sederhana, demokratisasi harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter; (2) dibangunnya sebuah rezim yang demokratis; (3) dilakukan pengkonsolidasian rezim demokratis itu¹⁰.

Sementara itu, Georg Sorensen menyatakan bahwa transisi dari pemerintahan nondemokratis (otoriter) menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Pemerintahan yang baru seringkali menjadi demokrasi yang terbatas, maksudnya bahwa pemerintahan baru tersebut memang lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya, namun belum demokratis secara penuh¹¹.

Tahapan-tahapan dalam transisi menuju demokrasi menurut Georg Sorensen ada tiga, yaitu: *pertama*, tahapan persiapan, pada tahapan ini ditandai dengan perjuangan politik yang bergerak untuk menghancurkan rezim nondemokratis. *Kedua*, tahapan keputusan, yang ditandai dengan telah terwujudnya elemen yang jelas dari tertib demokrasi. *Ketiga*, tahapan konsolidasi, dalam tahapan ini demokrasi baru lebih berkembang, sehingga praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik¹².

Politik sangat berhubungan erat dengan media massa, karena salah satu tujuan media massa yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal, terutama hal politik. Ketika pendapat umum tersebut dapat ter 'set' seperti yang diinginkan media

⁸ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 1.

⁹ Adam Przeworski, *Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi*, dalam Guillermo O'Donnell, dkk. (Ed.), *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 93.

¹⁰ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 45.

¹¹ Georg Sorensen, *op. cit.*, hal. 70-71.

¹² *Ibid.*

massa, pada saat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media massa. Antara dunia politik atau politik praktis dengan media massa terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan bahkan saling mempengaruhi. Media massa dengan fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum dan mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang.¹³ Merrill dan Lowenstein mengungkapkan bahwa media massa (surat kabar) tunduk pada sistem pers, dan sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. Artinya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau dalam penyampaian pesan, surat kabar harus berada dalam lingkaran regulasi yang ditetapkan.¹⁴

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, pemusatan peranan politik media massa telah diakui. Negara telah sering menekankan pentingnya pers dalam proses *nation building*. Kekuatan media massa terutama terletak pada kemampuan media massa dalam menampilkan peristiwa-peristiwa politik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik mengenai perkembangan politik. Keikutsertaan media massa dalam mengubah sistem politik dengan melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum yakni, upaya pembangunan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau aktor politik.¹⁵ Dalam kerangka ini media massa menyampaikan pemberitaan-pemberitaan politik kepada khalayak. Penyampaiannya dalam berbagai bentuk, antara lain berupa audio, visual maupun audio-visual yang didalamnya terdapat simbol politik dan fakta politik.

Oleh karena itulah, berbicara media massa sudah tidak bisa dilepaskan lagi lagi muatan-muatan politik dan begitu juga sebaliknya, berbicara politik tidak bisa dilepaskan dari media yang memuatnya. Pada masa yang semakin berkembang sekarang ini, berita-

¹³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989, hal.217.

¹⁴ Lihat Harsono Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal.17.

¹⁵ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita politik*, Jakarta: Granit, 2004, hal.9.

berita politik bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Kekuatan dominasi kekuasaan rezim yang meminggirkan dan menghilangkan otonomi media massa pada masa pemerintah Suharto tidak berlaku dengan keputusan Presiden BJ Habibie untuk mencabut Permenpen Nomor 01 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pada 5 Juni 1998. Setahun kemudian pemerintah bersama legislatif mereformasi Undang-Undang Pers yang lama dan menggantinya dengan Undang-Undang baru, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa pasal tentang kemerdekaan untuk memperoleh informasi diatur di dalamnya, begitu pula kran kebebasan terbuka bagi wartawan untuk memilih organisasi pers. Hal ini menghasilkan perubahan cukup signifikan pada kehidupan media massa, penerbitan pers marak. Singkatnya, media massa menjalankan peran politik, media massa dapat menjadi alat melawan bahkan menggulingkan pemerintahan represif bahkan diktator.

Pada masa pasca Orde Baru inilah, media massa memiliki keleluasaan dalam gerak politiknya, tidak hanya menyuarakan dan tunduk pada mekanisme pasar sesuai dengan model neoliberal ekonomi. Media massa dapat berperan mendukung konsolidasi demokrasi dan hal ini merupakan kekuatan politik media massa yang telah didukung oleh regulasi yang berlaku.

Untuk menganalisis lebih jauh kekuatan media massa, berikut ini akan penulis paparkan mengenai kekuatan masing-masing bentuk media massa yang berkembang pada saat ini.

1. Kekuatan Media Massa Cetak

Media massa cetak dalam konteks ini dibatasi dalam bentuk surat kabar, majalah, dan buku merupakan sarana komunikasi dan persuasi bagi para praktisi politik, para partisan politik, dan para pemerhati politik. Sebagai sarana komunikasi, media massa cetak tersebut dimanfaatkan untuk mensosialisasikan visi dan misi dari kandidat presiden,

memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin berkait dengan program-program jangka panjang dan pendek sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi para kandidat, memberikan liputan dalam kolom reguler maupun kolom khusus berkait dengan kampanye mereka, menyampaikan biografi dan karya-karya para kandidat berikut rencana kerja mereka. Informasi-informasi tersebut dikemas sedemikian rupa dalam aneka bentuk publikasi –liputan berita, liputan khusus, features, analisis, iklan, dan lain-lainnya– sehingga menjadi berguna dan menarik bagi para calon pemilih. Kemasan publikasi dalam media massa cetak seperti ini dimaksudkan sebagai sarana persuasi agar para calon pemilih tertarik, terpicat kepada calon presiden yang disosialisasikan dan dipopularitaskan dalam kampanye tersebut.

Media massa cetak tersebut bisa menarik karena sifatnya yang lama dalam pengertian bahwa informasi yang dipublikasikan tersebut bisa disimpan tanpa harus melakukan ‘recording’ sebagaimana dalam media massa siaran; dan kemudian informasi tersebut bisa mudah didapatkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian media massa cetak bukan merupakan media komunikasi, informasi, dan persuasi yang lewat begitu saja sebagaimana yang terjadi dalam media massa siaran baik radio maupun televisi. Di sinilah letak kekuatan media massa cetak.

Selain karena hal tersebut di atas, informasi media massa cetak juga mempunyai kekuatan bagi kalangan tertentu, khususnya bagi golongan berpendidikan. Informasi ataupun data dalam bentuk cetak sangat digemari oleh kalangan sebagaimana tersebut di atas. Mereka membutuhkan informasi dan data dalam bentuk cetakan karena jenis ini pada umumnya merupakan hasil suatu observasi dan analisis yang cukup mendalam dan representatif yang bisa menjadi acuan bagi mereka baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan lainnya. Pendapat senada juga disampaikan oleh William L. Rivers yang menyatakan bahwa secara umum, berdasarkan kesimpulan dari berbagai studi, orang berpendidikan tinggi lebih menyukai media cetak atau media bacaan dibandingkan

dengan media siaran; sedangkan mereka yang berpendidikan menengah lebih menyukai televisi dan radio.¹⁶

2. Kekuatan Media Siaran

Media massa siaran dalam konteks ini meliputi radio dan televisi. Dalam masyarakat politik di Indonesia pada saat ini, radio bukan merupakan media massa siaran yang dianggap sangat efektif dan efisien untuk kepentingan kampanye mengingat bahwa popularitas radio bagi masyarakat Indonesia semakin menurun bersamaan dengan munculnya media massa siaran televisi. Oleh karena itu, para praktisi politik, para partisan politik, pemerhati politik kurang memberikan prioritas terhadap penggunaan media massa siaran radio sebagai media komunikasi, informasi, dan persuasi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum, meskipun sebenarnya radio merupakan media yang praktis karena bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja, bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Mereka lebih memilih media massa siaran televisi karena televisi bisa memberikan tampilan lebih menarik dibandingkan kegiatan kampanye yang disiarkan melalui radio. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak menggunakan radio; mereka tetap menggunakan radio, hanya porsi nya tidak sebanyak yang mereka lakukan melalui media massa siaran televisi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, televisi memang merupakan media massa yang paling komunikatif dan paling digemari oleh kedua belah pihak (para politisi dan para pemilik hak pilih) karena televisi mempunyai sifat yang berbeda dari media massa lainnya, yaitu bahwa televisi merupakan perpaduan audio-visual sehingga dengan demikian televisi memberikan kesan sebagai penyampai isi atau pesan seolah-olah secara langsung antara komunikator (pembawa acara atau pengisi acara) dengan komunikan (pemirsa). Informasi

¹⁶ Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 307.

yang disampaikan melalui televisi mudah dimengerti karena secara bersamaan bisa didengar dan dilihat. Bahkan televisi bisa berperan sebagai alat komunikasi dua arah, khususnya dalam acara-acara ‘live show’.

Liputan televisi lebih disukai para politisi karena liputan itu nampak lebih nyata dan akrab daripada foto atau kutipan pembicaraan mereka yang dipublikasikan lewat surat kabar, apalagi televisi bisa melakukan siaran langsung sehingga lebih dipercaya karena tidak dapat diedit seperti halnya media massa cetak. Televisi dapat berfungsi sebagai menjadi sumber informasi utama bagi para pemilih. Televisi merupakan medium demokrasi yang sesungguhnya.¹⁷

Menurut Yusuf Maulana, pengelolaan kesan—yang dapat disampaikan melalui televisi— merupakan bagian terpenting dalam komunikasi politik. Visualisasi tubuh dan artikulasi verbal dari para kandidat maupun tim sukses atau para aktor dan narrator dalam penayangan tersebut merupakan bagian dari fungsi bahasa yang harus diperhatikan sehingga dengan demikian penayangan itu merupakan hasil dari pengolahan citra melalui bahasa, yang menurut istilah Ben Anderson gejala ini disebut ‘penopengan’ yang mereduksi, bahkan mendistorsi pesan yang seharusnya tampil sebagaimana adanya. Dalam kampanye, tentunya, kesan atau citra yang ingin diperoleh adalah yang positif-persuasif yang kemudian mampu mendapatkan perhatian dari para pemirsa, yang akhirnya mampu mengubah persepsi atau memperteguh persepsi untuk memilih kandidat presiden yang dikehendaki dalam penayangan tersebut.¹⁸

Bentuk penayangan berikutnya adalah liputan kampanye dalam acara berita reguler maupun dalam berita khusus yang disediakan oleh stasiun televisi dalam rangka kampanye. Cara penayangan ini juga menjadi media bagi para kandidat dan tim suksesnya untuk memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin kepada para pemirsa sehingga mampu memberikan wacana yang representatif dan komprehensif, yang pada akhirnya

¹⁷ *Ibid.*, hal. 326

¹⁸ Maulana, Yusuf, *Kredibilitas Iklan Politik di Televisi*, Kompas, Sabtu, 26 Juni 2004, hal. 5

diharapkan bisa mempunyai daya pengaruh yang kuat bagi para calon pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Demikian juga dengan bentuk penayangan melalui acara diskusi dan debat terbuka baik yang dirancang oleh stasiun televisi maupun yang dirancang oleh panitia pemilihan presiden. Semuanya itu dikemas dalam rangka memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin kepada para pemirsa, khususnya kepada target mereka, yaitu mereka yang mempunyai hak pilih. Acara diskusi dan debat terbuka baik yang disiarkan secara langsung maupun melalui siaran tunda mempunyai kekuatan dan daya tarik tersendiri karena melalui acara ini pemirsa bisa mendapatkan gambaran langsung tentang kualitas kandidat presiden yang ada; di pihak lain, masing-masing kandidat dan timnya bisa memaksimalkan cara persuasinya dalam berbagai bentuk tampilan untuk memikat calon pemilihnya.¹⁹

3. Kekuatan Media Internet

Selain media massa cetak dan televisi, pada masa sekarang ini para praktisi maupun partisan politik juga menggunakan media internet dalam *websites* sebagai sarana komunikasi, informasi, dan persuasi berkaitan dengan pemilihan umum. Hal ini bisa dilihat dari makin banyaknya situs-situs di internet (*websites*) yang menyediakan informasi dalam arti luas (tulisan, audio-visual) berkaitan dengan pemilihan umum. Situs-situs tersebut memberikan informasi lengkap dan persuasif karena situs-situs tersebut merupakan tampilan gabungan dari media cetak dan media audio-visual. Situs-situs bisa menampilkan seperti apa yang dipublikasikan oleh media massa cetak sekaligus juga bisa menampilkan sebagaimana yang disiarkan oleh radio dan televisi. George Clack menyatakan bahwa internet mengubah cara komunikasi politik dan sekaligus mengubah wacana publik dengan cara yang halus. Internet telah mengubah dengan cepat jurnalisme dalam arti bahwa para reporter telah mampu dengan cepat mengakses ‘*government documents and databases*,

¹⁹ Ibid.

public and private libraries, and archives of newspapers and other publications'.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa di masa mendatang internet akan menjadi salah satu media massa yang sangat berpengaruh atau bahkan bisa menjadi media massa yang unggul, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan.

Perubahan cara komunikasi politik ini juga dimanfaatkan oleh para praktisi politik, khususnya para tim pelaksana kampanye kepresidenan dengan menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan persuasi demi keberhasilan kerja mereka. Mereka menggunakan websites untuk berkampanye dengan memberikan informasi lengkap dan persuasif dalam tampilan aneka macam yang bisa dilengkapi dengan fasilitas audio-visual. Bahkan mereka menciptakan komunikasi dua arah lewat *websites* tersebut.

D. SIMPULAN

Peran media massa dalam menyalurkan informasi tentang peristiwa politik yang terjadi, sering memberikan dampak signifikan bagi perkembangan dinamika politik. Bahkan, seringkali peran media tidak sekedar sebagai penyalur informasi atas peristiwa politik yang sungguh terjadi, lebih dari itu media massa mempunyai potensi untuk membangun opini publik yang bisa mendorong terjadinya perubahan atas konstruksi realitas politik.

Media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, dan karena itu tingkat kerumitan isu dalam media tinggi. Hubungan antara pemerintah dengan media dan politik; dan media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, keduanya menjadi hal yang kontroversial dalam kajian media umumnya. Penggambaran tentang bagaimana media berandil dalam meruntuhkan sistem politik Orde Baru pada Mei 1998. Koike mengidentifikasi peranan politis media dalam gerakan reformasi menentang pemilik stasiun televisi, di mana anak -anak Suharto dan

²⁰ Clack, George (ed), *United States Elections 2000*, U.S. Department State, Office of International Information Programs, 2000, hal. 42.

kroninya. Teknologi mutakhir semacam internet memainkan peranan sangat besar dalam mendukung reformasi dan gerakan demokrasi. Contoh email yang ditulis oleh George Aditjondro yang dipublikasi dalam sebuah website oleh orang-orang Indonesia di Jerman. Para pelajar Indonesia menemukan artikel Aditjondro pada internet, mencetaknya dan menjual fotokopi dari artikel itu di jalanan, dan hal ini merupakan informasi kontroversial yang langsung menyebar dengan cepat dan meluas di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh dari masalah dimana sebuah medium baru dan medium tradisional sangat efektif bila digabung.²¹

Mendemokratisasi komunikasi menuntut adanya kebebasan untuk berbicara dan menggunakan hak tersebut untuk berkomunikasi. Ini menempatkan kewajiban yang sama pada masyarakat demokrasi untuk memberi kesempatan dan sarana untuk menggunakan hak ini, yaitu dengan membantu, mendukung dan mensubsidi badan atau organisasi dan kegiatan operasional dari surat kabar, jurnal, media penyiaran, dan sebagainya, yang diterbitkan oleh organisasi, kelompok minoritas, dan semua kelompok yang tidak mampu mendanai pendirian dan kegiatan operasional media mereka. Dengan kata lain, penciptaan sektor sipil dari media massa, merupakan upaya non komersial untuk berbicara dan bagi kelompok sosial, ini memberi kesempatan pada mereka untuk berbicara dengan suara mereka sendiri. Sejak model demokrasi juga menjadi model parsipatoris, sektor sipil ini tidak hanya akan terdiri atas media massa, namun juga media yang terdesentralisasi atau media akar rumput. Seperti halnya media kecil yang memberi perlawanan penting kepada rezim otoriter dan berperan sebagai agen *civil society* dalam proses pembentukannya dan juga tahap pelaksanaannya, ketika demokrasi tercapai, mereka berperan dalam distribusi kekuatan komunikasi diantara kelompok sosial (politik, ekonomi, etnis, budaya, agama, dan sebagainya) dan memainkan peran khusus dengan

²¹ Makato Koike, *Globalizing Media and Local Society in Indonesia*, dalam IIAS News, 2002.

mengekspresikan sikap, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi dari sektor sosial pada tingkat lokal.²²

Selepas Orde Baru, tak dapat dimungkiri bahwa pers telah berperan besar dalam mengawal demokratisasi Indonesia yang bergulir deras hingga kini. Berdasarkan itu, pers Indonesia betul-betul pantas menyandang predikat sebagai pilar keempat demokrasi. Namun demi independensi institusi pers itu sendiri, diperlukan pengaturan lebih lanjut perihal kepemilikan saham di dalamnya. Sebab, bukan tidak mungkin pers sendiri dimanfaatkan oleh pemiliknya demi kepentingan politik tertentu. Maka, masalah "surat izin" yang dulu hidup matinya berada di tangan pemerintah, kini dan nanti bisa saja ancaman itu berubah menjadi si pemilik modal sebagai penguasa atas pers. Artinya, karena si pemegang saham pers memiliki kepentingan politik tertentu yang ingin dicapainya, maka bisa saja ia atau mereka mempengaruhi berita, analisis, maupun opini yang akan disuarakan oleh pers tersebut. Alhasil, para redaktur pers itu pun kian lama kian tidak bebas dalam berekspresi. Usulan dimasukkannya aturan kebebasan pers dalam amendemen UUD 1945 yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menguatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Selain itu, hadirnya kebebasan pers dalam konstitusi sangat tepat untuk membangun pranata konstitusional. Pers memang diakui sangat berperan dalam memberitakan informasi termasuk masalah yang ditemui seputar persiapan pemilu. Sebagian besar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui gegap gempita kampanye terbuka melalui liputan media massa. Diakui atau tidak, peran pers sangat besar dalam kesuksesan pemilu 2009. Karena itu, mendorong profesionalisme pers dalam meliput pemilu berarti sejalan dengan upaya mendorong pemilu yang berkualitas dan demokratis.²³

Banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik. Memang harus diakui, efektivitas media untuk suatu perubahan politik memerlukan

²² McQuail, Dennis, *Communication Theory: An Introduction* (London: Sage, 1987).

²³ Lihat Etika No. 71/ Maret 2009 hal. 2.

situasi politik yang kondusif, yang populer disebut keterbukaan politik. Tetapi pers yang bebas merupakan salah satu indikator adanya keterbukaan politik itu sendiri, karena pers yang bebas juga merangsang terjadinya kebebasan politik. Pemberitaan-pemberitaan politik yang actual dan kritis dapat memberi kesadaran pada masyarakat tentang perlunya sistem politik yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA Jilid III*. Jakarta: Erlangga.
- Clack, George (ed). 2000. *United States Elections 2000*, U.S. Department State, Office of International Information Programs.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Koike, Makato. *Globalizing Media and Local Society in Indonesia*, dalam IAS News, 2002.
- McQuail, Dennis, 1987. *Communication Theory: An Introduction*. London: Sage
- Maulana, Yusuf. *Kredibilitas Iklan Politik di Televisi*, dalam Kompas, Sabtu, 26 Juni 2004.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- O'Donnel, Guillermo dkk. (Ed.). 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*. Jakarta: LP3ES.
- Rivers, William L, Jay W. Jensen, dan Theodore Peterson. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.